

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Audit dan Prosedur Audit

Pengertian dan konsep audit adalah :

2.1.1 Pengertian Audit

Menurut Standar Audit (SA) 200 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menilai tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (IAPI, 2022).

2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan utama audit adalah untuk memberikan opini atau simpulan yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Hery, 2019).

1. Untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan.
2. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
3. Untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.
4. Untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi memiliki risiko tinggi.
5. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen perusahaan.
6. Untuk memberikan jaminan atas integritas sistem pengendalian internal perusahaan.

7. Untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat.

2.1.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Hery (2019: 12-13) jenis-jenis audit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan dilakukan oleh auditor independen sesuai dengan standar audit yang berlaku umum (GAAS) untuk menentukan apakah laporan keuangan entitas dan pengungkapan terkait disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuannya adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) adalah jenis audit yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau kegiatan telah mematuhi peraturan, kebijakan, kontrak, atau persyaratan tertentu yang berlaku. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah entitas telah mematuhi hukum, peraturan, atau persyaratan tertentu.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit Operasional (*Operational Audit*) adalah jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau departemen tertentu.

4. Audit Forensik (*Forensic Audit*)

Audit Forensik adalah jenis audit yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti tentang kecurangan, penyalahgunaan aset, atau pelanggaran bisnis lainnya.

5. Audit Sistem Informasi (*Information Systems Audit*)

Audit Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi telah dibangun, diterapkan, dan dikelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal atas sistem informasi yang digunakan oleh entitas.

6. Audit Lingkungan (*Environmental Audit*)

Audit Lingkungan adalah proses audit untuk mengevaluasi dan menilai kinerja lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan lingkungan hidup.

7. Audit Manajemen (*Management Audit*)

Audit Manajemen adalah proses audit yang menyeluruh tentang seberapa efektif dan efisien manajemen suatu organisasi atau unit bisnis dalam mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan kinerja.

2.1.4 Prosedur Audit

Menurut Standar Audit (SA) 500 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2020) prosedur audit adalah tindakan yang dilakukan auditor sesuai

dengan Standar Audit yang berlaku untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang cukup dan tepat.

Menurut Arens (2020: 23) : “*Audit procedures are the specific techniques used by the auditor to gather and evaluate audit evidence*”. Prosedur audit adalah teknik-teknik spesifik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit.

Prosedur audit dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan, tahapan dan langkah yang diambil oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang memadai untuk mencapai tujuan audit.

2.1.5 Jenis-Jenis Prosedur Audit

Auditor dapat menerapkan dua jenis prosedur audit utama, yaitu :

1. Pengujian Pengendalian (*Test Of Controls*)

Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas desain dan pengoperasian pengendalian internal yang relevan terhadap audit, untuk menentukan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai (IAI, 2020). Fokus dari pengujian ini adalah menguji apakah pengendalian internal yang dirancang oleh manajemen telah diimplementasikan dengan baik serta menilai apakah pengendalian internal tersebut berfungsi secara efektif dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material.

Tahapan dari pengujian pengendalian (*test of controls*) ini adalah :

a. Observasi

Mengamati penerapan pengendalian internal oleh karyawan.

b. Inspeksi

Memeriksa dokumen atau catatan yang terkait dengan pengendalian internal.

c. Wawancara

Menanyakan kepada karyawan mengenai pemahaman dan penerapan pengendalian internal.

d. Pengujian Ulang

Melakukan pengujian ulang atas pengendalian internal yang telah diterapkan.

2. Pengujian Substantif (*Substantive Test*)

Menurut IAI (2020) pengujian substantif adalah prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Pengujian substantif terdiri dari uji rincian (*test of details*) dan prosedur analitis (*analytical procedures*). Fokus dari pengujian ini adalah menguji rincian transaksi dan saldo akun dalam laporan keuangan serta mengevaluasi pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tahapan dari pengujian substantif (*substantive test*) ini adalah :

a. Pengujian Rincian (*Test of Details*)

Tahapan awal dalam proses audit dan tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat tentang saldo akun atau transaksi tertentu.

b. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Tahapan audit yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan serta tren yang tidak biasa dalam laporan keuangan atau informasi

lainnya dengan membandingkan rasio, tren, dan hubungan antara data keuangan.

c. Konfirmasi (*Confirmation*)

Tahapan audit ini adalah tahapan untuk memperoleh bukti audit secara langsung dari pihak ketiga atau pihak eksternal atas kebenaran saldo akun dan transaksi.

d. Observasi (*Observation*)

Tahapan audit yang melibatkan pengamatan langsung oleh auditor terhadap suatu aktivitas atau proses bisnis yang sedang berlangsung dalam suatu entitas.

2.2 Utang Usaha

Akun utang usaha (*accounts payable*) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan posisi keuangan (neraca) suatu entitas. Penjabaran dari utang usaha adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pengertian Utang Usaha

Menurut Hery (2019: 13) utang usaha (*accounts payable*) adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada pemasok (*supplier*) sebagai akibat dari adanya pembelian secara kredit, pengertian ini sama dengan pengertian utang usaha menurut PSAK Nomor 1 (2018), utang usaha (*accounts payable*) merupakan kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok dan

kreditor dagang. Utang usaha merupakan salah satu komponen kewajiban lancar dalam laporan posisi keuangan (neraca) suatu entitas.

2.2.2 Klasifikasi Utang

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB, 2020: 12) utang usaha diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Utang Jangka Pendek (*Current Liabilities*)

Utang jangka pendek (*current liabilities*) adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus bisnis. Utang usaha termasuk dalam utang jangka pendek. Karakteristik dari utang jangka pendek adalah :

a. Jangka Waktu Kurang dari 1 Tahun

Utang jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, berbeda dengan utang jangka panjang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

b. Sebagai Sumber Pendanaan Operasional

Penggunaan utang jangka pendek ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Contohnya adalah utang usaha, utang gaji, dan utang pajak.

c. Bersifat Berulang

Utang jangka pendek bersifat berulang, yang akan selalu timbul dan perlu dikelola secara berkelanjutan. Contohnya adalah utang usaha yang selalu ada sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa dengan kredit.

2. Utang Jangka Panjang (*Long-term Liabilities*)

Utang Jangka Panjang (*Long-term Liabilities*) adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dari tanggal neraca. Berikut adalah karakteristik utang jangka panjang :

a. Jangka Waktu Lebih dari 1 Tahun

Hal yang membedakan utang jangka pendek dan utang jangka panjang yaitu waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun untuk utang jangka panjang.

b. Sebagai Sumber Pendanaan Investasi

Utang jangka panjang digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang perusahaan. Utang jangka panjang merupakan bagian dari komponen struktur modal perusahaan. Contohnya adalah utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank jangka panjang.

c. Biaya Bunga dan Jaminan Aset

Utang jangka panjang terdapat biaya bunga yang harus dibayar secara periodik dan terdapat jaminan dengan aset tertentu perusahaan. Adanya biaya bunga ini diakui menjadi beban bagi perusahaan. Contohnya adalah utang hipotek yang dijamin dengan aset tetap.

2.2.3 Pengakuan Utang Usaha

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (IAI, 2018) di Indonesia, pengakuan utang usaha adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan Awal

Utang usaha diakui pada saat entitas menerima barang atau jasa dari pemasok dan pada saat itu timbul kewajiban untuk membayar kewajiban kepada penjual atau pemasok.

2. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, utang usaha diukur sesuai dengan nilai wajarnya yaitu nilai sebenarnya yang harus dibayarkan. Nilai wajar utang usaha setara dengan harga faktur atau jumlah yang harus dibayar kepada pemasok untuk barang atau jasa yang diterima.

3. Pengungkapan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, utang usaha disajikan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan (neraca) perusahaan. Utang usaha harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan lebih lanjut yang disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan adalah berupa kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan dan pengukuran utang usaha, rincian utang usaha berdasarkan umur utang (*aging schedule*), utang usaha kepada pihak berelasi (jika ada) dan informasi lain yang dianggap relevan, seperti jatuh tempo pembayaran dan sebagainya.

2.3 Pengujian Substantif Atas Akun Utang Usaha

2.3.1 Tujuan Pengujian Substantif Atas Akun Utang Usaha

Adapun tujuan dari pengujian substantif ini adalah :

- a. Memastikan bahwa utang usaha telah dicatat dengan keadaan yang sebenarnya dan merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.
- b. Memastikan bahwa utang usaha telah diklasifikasikan dan dicatat dengan jumlah yang akurat.
- c. Memastikan bahwa utang usaha telah disajikan secara benar, wajar dan bebas dari adanya salah saji material dalam laporan keuangan.

2.3.2 Tahapan Pengujian Substantif Atas Akun Utang Usaha

Setelah terjadinya perikatan dengan klien tentang pelaksanaan pekerjaan audit mengenai tim audit yang dibentuk, anggaran audit, waktu penyelesaian audit serta pemahaman bisnis klien, maka selanjutnya auditor akan melakukan beberapa tahapan berikut untuk melaksanakan audit :

1. Tahapan Perencanaan Pengujian

Dalam melakukan audit atas akun utang usaha, auditor perlu merencanakan pengujian rincian yang komprehensif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Beberapa tahapan perencanaan pengujian yang dilakukan adalah :

- a. Setelah terjadinya perikatan awal audit dan adanya kesepakatan mengenai tim audit, anggaran audit, waktu audit, dan materialitas awal, tahapan perencanaan selanjutnya adalah memahami saldo transaksi atau akun yang akan diperiksa yaitu akun utang usaha dengan menentukan tujuan pengujian, seperti prosedur yang akan digunakan, verifikasi utang usaha, kelengkapan akun utang usaha, akurasi nilai utang usaha, dan klasifikasi utang usaha.

- b. Mengembangkan prosedur pemeriksaan yang memenuhi tujuan pemeriksaan utang usaha, seperti pemeriksaan dokumen sumber, dokumen pendukung, konfirmasi saldo utang usaha dengan perusahaan, pemeriksaan umur utang dan lain-lain.
- c. Menentukan ukuran sampel yang representatif untuk akun utang usaha dan menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan selama proses audit dengan pengujian substantif.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengujian

Setelah dilakukannya tahapan perencanaan pengujian substantif untuk akun utang usaha, kemudian dilakukan tahapan pelaksanaan untuk memulai penerapan prosedur audit. Tahapan pelaksanaan pengujian substantif ini yaitu:

- a. Mengumpulkan bukti audit yang relevan sesuai dengan prosedur pengujian yang direncanakan dan sampel yang telah ditentukan sebelumnya pada tahapan perencanaan pengujian.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang telah dipilih pada tahap perencanaan, dengan mencocokkan dokumen sumber dengan catatan akuntansi, memeriksa dokumen pendukung untuk sampel transaksi utang usaha, seperti faktur pembelian, catatan penerimaan barang, dan bukti pembayaran utang.
- c. Memverifikasi jumlah saldo akun utang usaha telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat dan dilakukan analisis umur utang dengan kartu umur utang guna memastikan waktu jatuh tempo utang usaha telah dicatat pada periode yang tepat serta

- d. Menghitung rasio utang usaha terhadap pembelian untuk mengevaluasi kewajaran saldo dengan rasio materialitas yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian membandingkan rasio tersebut dengan periode sebelumnya atau industri sejenis serta menganalisis tren saldo utang usaha dan membandingkannya dengan tren pembelian.
- e. Mencatat hasil pengujian substantif atas akun utang usaha, termasuk temuan audit atau penyimpangan yang teridentifikasi selama pelaksanaan pengujian substantif.

3. Tahapan Evaluasi Pengujian

Tahapan pelaksanaan pengujian yang telah selesai akan dikomunikasikan bersama dengan tim audit kemudian dilaksanakan tahapan evaluasi pengujian.

Tahapan evaluasi pengujian ini antara lain :

- a. Mengevaluasi hasil pengujian substantif untuk memastikan kewajaran saldo utang usaha dengan menganalisis hasil pengujian dan menilai apakah tujuan pengujian substantif untuk utang usaha telah tercapai.
- b. Menghitung perkiraan penyimpangan yang ditemukan dan mengevaluasi dampaknya terhadap saldo akun atau transaksi utang usaha.
- c. Menentukan apakah perlu melakukan pengujian tambahan atau prosedur lain untuk mendapatkan bukti yang cukup.
- d. Mengkomunikasikan dengan tim audit untuk temuan audit, draft kertas kerja pemeriksaan dan kesimpulan dari pelaksanaan pengujian yang telah dilakukan.

4. Tahapan Pelaporan

Setelah berbagai tahapan dilakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengujian dilakukan, berikutnya adalah tahapan pelaporan untuk pengujian substantif akun utang usaha. Beberapa tahapannya adalah :

- a. Mendokumentasikan proses pengujian rincian, termasuk prosedur yang dilakukan, sampel yang dipilih, temuan audit dan rekomendasi.
- b. Menyampaikan kepada manajemen perusahaan atas pelaksanaan pengujian substantif yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- c. Memberikan opini audit independen untuk penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan berupa *management letter*.

2.4 Materialitas

2.4.1 Definisi

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), materilitas adalah besarnya nilai penghilangan atau salah saji informasi yang dilihat dari keadaan di sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Standar Audit (SA) 320 (Revisi 2021) mengenai materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit bahwa auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai resiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat serta luasnya prosedur audit lanjutan.

2.4.2 Tingkatan Materialitas

Menurut Tuanakotta (2022:127-128), materialitas terbagi dalam dua tingkat yaitu :

1) Materialitas Keseluruhan (*Overall Materiality*)

Materialitas ini adalah tingkat materialitas secara menyeluruh yang ditetapkan berdasar persepsi auditor untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor menetapkan materialitas sebesar angka salah saji yang dapat ditoleransi dan tidak berdampak pada laporan keuangan. Materialitas keseluruhan ini yang akan digunakan dalam penentuan opini auditor. Hubungan penentuan materialitas dengan opini auditor adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada salah saji sehingga auditor dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Beberapa salah saji yang jumlahnya dibawah nilai material (immaterial) sehingga auditor dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- c. Salah saji melebihi angka materialitas dan manajemen tidak bersedia mengoreksi kesalahannya maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat diberikan.

2) Materialitas Pelaksanaan (*Performance Materiality*)

Materialitas ini adalah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah dari materialitas keseluruhan (*overall materiality*) untuk menerapkan prosedur audit pada tingkat saldo akun, transaksi atau *disclosure* tanpa mengubah nilai materialitas keseluruhan (*overall materiality*). Penentuan materialitas pelaksanaan ini merupakan *tolerable misstatements* yang digunakan pada saat audit *sampling*.